
Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

An Analysis of Quality of Central Sulawesi Government Financial Report

¹Sukran*, ²Rajindra, ³Dicky Yusuf

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu

(*)Email Korespondensi: sukran.sukran@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan dana masyarakat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah. Sejak tahun 2014 s.d tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian dan mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan RI. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah Sulawesi Tengah telah menunjukkan laporan keuangan yang berkualitas karena : Telah memenuhi unsur-unsur kualitatif laporan keuangan sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah WTP sebanyak 6 kali dan 5 kali secara berturut-turut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah sesuai dengan Standard dan Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci : Kualitas Laporan Keuangan

Abstract

Central Sulawesi Provincial government as one of the accounting entities is obliged to prepare local government financial reports as a form of accountability for the use of public funds. Central Sulawesi provincial government's financial report was audited by the central Sulawesi republic of Indonesia's supreme audit board (BPK). Since 2014 to 2018, central Sulawesi provincial government has received the fair unqualified BPK's opinion and received an award from the ministry of finance of the republic of Indonesia. The results of this research state that the financial reports of the central Sulawesi government has have been qualified because : it has fulfilled the qualitative elements of financial reports as stipulated in government accounting standards (SAP) that are relevant, reliable, comparable and understandable. BPK's opinion fair unqualified 6 times and 5 times in a row show that the financial reports have been based on the standards and legislation concerning regional financial management.

Keyword : *Financial Reports Quality*

PENDAHULUAN

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, merupakan kebutuhan akuntabilitas sebagai wujud dari pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya pemerintah daerah. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah daerah dalam memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik. Hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD Tahun 2017 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 411 (76%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 113 (21%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 18 (3%) LKPD. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016, kualitas LKPD Tahun 2017 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 6 poin persen yaitu dari 70% pada LKPD Tahun 2016 menjadi 76% pada LKPD Tahun 2017. Pada LKPD Tahun 2016, sebanyak 378 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (70%), sedangkan pada LKPD Tahun 2017 sebanyak 411 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (76%). Selain kenaikan jumlah opini WTP, juga terjadi kenaikan opini dari opini TMP menjadi opini WDP sebanyak 7 LKPD dan dari opini WDP menjadi WTP sebanyak 45 LKPD. Daftar Opini LKPD Tahun 2013-2017. (IHPS I, 2018 : 100-101). Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding LKPD Tahun 2016, tetapi terdapat 14 dari 542 (3%) LKPD yang mengalami penurunan opini. Penurunan opini tersebut lebih rendah 2 poin persen dari penurunan opini tahun 2016 sebesar 5% (25 dari 542 LKPD).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan dana masyarakat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah. Sejak tahun 2014 s.d tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian dan mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan RI.

Hasil opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari beberapa temuan yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi baik yang terkait sistem pengendalian intern atau kepatutan terhadap perturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah sendiri sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan. Media pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun anggaran, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas laporan yang laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat.

METODE

Metode analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh agar data-data tersebut dapat dipahami bukan saja oleh orang yang meneliti (peneliti), akan tetapi juga oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian itu. Menurut M. Burhan (2009 : 108) Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat interaktif, berlangsung dalam lingkaran yang saling tumpang tindih.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data-data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan dianalisis dengan membuat kategorisasi agar mempermudah dalam penafsiran data. Masing-masing data yang telah dikategorisasi, dikaitkan untuk memperoleh hubungan agar sampai pada kesimpulan. Secara sistematis, dalam menganalisa data penelitian ini, data yang diperoleh dalam penelitian terlebih dahulu dicatat dan diberi kode agar sumber datanya dapat ditelusuri. Setelah proses pencatatan selesai, data-data tersebut dikumpulkan untuk dipilah-pilah dan dikategorikan. Menurut Lexy (2009 : 248) Agar kategori tersebut memiliki makna, maka dicari hubungan-hubungan dan pola-pola yang terdapat dalam data untuk dibuat temuan-temuan umum. Dengan langkah analisis data deskriptif kualitatif demikian dapat diperoleh hasil penelitian yang mencerminkan hasil sebenarnya yang diharapkan.

HASIL

Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah terhadap rakyat atas wewenang yang diamanatkan oleh rakyat kepada pimpinan daerah. Pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi pemerintah berbasis akrual masih kurang namun pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terus melakukan upaya baik melalui pembinaan dan pendampingan terhadap OPD.

Adanya peraturan pemerintah berbasis akrual didukung dengan adanya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 membawa perubahan dalam penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah termasuk pemerintah daerah dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Menurut Kepala Bidang Akuntansi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memulai menerapkan basis akrual sejak laporan tahun 2015 sebagaimana amanat peraturan yang berlaku.

Basis akrual merupakan basis yang mengakui pendapatan dan beban berdasarkan tanggal transaksi yang terjadi, meskipun kas belum dikeluarkan. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan basis akrual untuk mengakui aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca serta pendapatan dan beban dalam laporan operasional dan menggunakan basis kas dalam mengakui pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pada Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam menjalankan program-program yang sudah dianggarkan setiap periode, pemerintah daerah membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Sumber-sumber pendapatan dana untuk membiayai APBD yang disusun setiap tahunnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan yang direalisasi yaitu hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan restribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Jumlah PAD pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.016.628.663.677,00 yang terdiri dari:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pajak daerah sebesar | Rp. 835.456.979.571,00 |
| 2. Restribusi daerah | Rp. 11.225.203.122,00 |
| 3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. 16.907.254.096,00 |
| 4. Lain-lain PAD yang sah | Rp. 153.039.226.888,00 |
| 5. | |

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer atau dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah Pusat (APBN) maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, alokasi khusus, dana penyesuaian tunjangan profesi guru PNSD dan dana bagi hasil pajak dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah pendapatan transfer tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.731.430.163.822,00 yang terdiri dari:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. 196.347.609.076,00 |
| 2. Dana Alokasi Umum | Rp. 1.586.163.908.000,00 |
| 3. Dana Alokasi Khusus | Rp. 948.918.646.746,00 |

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan di luar pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yaitu berupa bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan dana hibah dari pemerintah pusat. Jumlah pendapatan daerah yang sah tahun 2018 adalah sebesar Rp. 133.089.251.798,17 yang terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah	Rp.30.764.588.185,17
2. Pendapatan Lainnya	Rp. 102.324.663.613,00

Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), pendapatan dalam mata uang asing dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Perlakuan Akuntansi Beban pada Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban LO tahun 1018 sebesar Rp. 2.375.839.366.938,35 yang terdiri dari :

a. Beban pegawai	Rp. 1.317.721.362.383,00
b. Beban barangdan jasa	Rp. 833.161.797.093,86
c. BebanHibah	Rp. 188.552.690.241,00
d. Beban Bantuan Sosial	Rp. 1.184.500.000,00
e. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 654.024.966.245,44
f. Beban Penyisihan Piutang	Rp. 243.934.821,48
g. Beban lain-lain	Rp. 34.975.082.399,01

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban juga diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh dengan harga perolehan.

Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi anggarannya dalam satu periode pelaporan di Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.605.313.978.384,14,-terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 1.031.804.592.650,88
b. PendapatanTransfer	Rp. 2.414.616.174.246,00
c. Lain-lain PAD yang sah	Rp. 158.893.211.487,26

Jumlah Belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.221.869.072.722,17,- :

a. BelanjaOperasi	Rp. 2.761.850.688.897,50
b. Belanja Modal	Rp. 459.780.934.224,67
c. Belanja Tak Terduga	Rp. 237.449.600,00

Jumlah Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 406.143.964.908,00 terdiri dari:

Transfer bagi hasil pendapatan Rp. 406.143.964.908,00 jumlah pembiayaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 253.135.041.667,00.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah saldo anggaran lebih akhir tahun per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 439.534.795.927,97.

Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018. Jumlah asset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 5.302.997.696.496,89 terdiri dari:

- a. Aset lancar Rp. 541.135.595.682,70
- b. Investasi jangka panjang Rp. 306.384.537.126,26
- c. Aset tetap Rp. 4.371.956.059.707,87
- d. Aset lainnya Rp. 83.521.503.980,06

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 63.266.382.356,25 terdiri dari:

- a. Utang perhitungan pihak ketiga Rp. 1.349.379,00
- b. Pendapatan Diterima dimuka Rp. 203.319.963,33
- c. Utang beban Rp. 125.715.506,00
- d. Utang jangka pendek lainnya Rp. 62.935.997.507,92

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 5.239.731.314.140,64. Ringkasan Neracaper 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018, terlihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Neracaper 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET		
Aset Lancar	541.135.595.682,70	316.344.598.656,62
Investasi Jangka Panjang	306.384.537.126,26	277.693.219.556,48
Aset Tetap	4.371.956.059.707,87	4.318.857.905.692,14
Aset Lainnya	83.521.503.980,06	554.674.873.804,10
JUMLAH ASET	5.302.997.696.496,89	5.467.570.597.709,34
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek	63.266.382.356,25	66.561.791.219,17
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	63.266.382.356,25	66.561.791.219,17

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Laporan Operasional

Laporan operasional menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya mencakup unsur pendapatan dan beban selama periode 01 Januari sampai 31 Desember 2018.

Realisasi pendapatan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.605.313.978.384,14. Realisasi Beban Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.446.244.561.365,79, sehingga terdapat surplus tahun berjalan bersih sebesar Rp. 159.950.368.680,03. Ringkasan laporan operasional Tahun 2018 dapat disajikan terlihat tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2018

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PENDAPATAN - LO	3.605.313.978.384,14	4.824.140.423.119,88
BEBAN	3.446.244.561.365,79	3.475.414.930.092,68
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	159.069.417.018,35	1.348.725.493.027,20

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.118.401.261,68	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	160.187.818.280,03	1.348.725.493.027,20
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(237.449.600,00)	(134.012.500,00)
SURPLUS/DEFISIT-LO	159.950.368.680,03	1.348.591.480.527,20

Sumber : Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keluar masuk arus kas yang berasal dari pendapatan dan kas yang dibayarkan untuk beban. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp. 711.588.490.641,67 arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan sebesar Rp. 458.453.448.974,67 arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp. 39.184.000.000,00. Ringkasan Laporan Keuangan Arus Kas Tahun 2018 dan Tahun 2017 dapat disajikan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Ringkasan Laporan Keuangan Arus Kas Tahun 2018 dan Tahun 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	711.588.490.641,67	657.546.144.192,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(458.453.448.974,67)	(464.980.546.461,97)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(39.184.000.000,00)	(37.334.000.000,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	60.736.422,00	256.575.899,24
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	214.011.778.089,00	155.488.173.629,96
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya, Kas BLUD, Kas BOS	225.524.367.217,97	70.036.193.588,01
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya, Kas BLUD, Kas BOS	439.536.145.306,97	225.524.367.217,97
Kas Di Bendahara Pengeluaran	-	94.199.463,00
Saldo Akhir Kas	439.536.145.306,97	225.618.566.680,97

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Jumlah Ekuitas awal Sebesar Rp. 5.401.008.806.490,17. Surplus-LO sebesar Rp. 159.950.368.680,03 Selisih Aset Tetap sebesar 0,00. Koreksi

Ekuitas Lainnya Sebesar (Rp 321.227.861.029,56) sehingga jumlah. Ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 5.239.731.314.140,64.

PEMBAHASAN

Catatan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menguraikan tentang penjelasan umum tentang Provinsi Sulawesi Tengah, dasar hukum, kebijakan akuntansi, ekonomi makro, target kerja APBD serta penjelasan pos-pos laporan keuangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam penyajian laporan operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya pendapatan dan dikeluarkannya beban, serta timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan. Materi laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 ini memuat LRA, LAPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK serta Kinerja Keuangan.

Hasil penilitan menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki syarat diakuntansikan dengan benar. Dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah setiap unsur-unsur laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan harus diakuntansikan dengan benar.

Dilaporkan secara lengkap oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah artinya bahwa laporan keuangan yang telah disusun telah memenuhi syarat-syarat yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding dan tidak menyesatkan pembaca. Proses diaudit pada laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara Internal. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang sering dilakukan audit orinternal.

Laporan keuangan yang berkualitas adalah salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik khusus di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah berkualitas yang tercantum didalam PP No. 71 tahun 2010, yaitu: Relevan, Laporan keuangan dikatakan relevan apabila keputusan pengguna dipengaruhi oleh informasi yang termuat didalamnya dengan membantu pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi tersebut. Selain itu, informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan memiliki manfaat umpan balik informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

Memiliki manfaat prediktif informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Tepat waktu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memegang prinsip andal yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta diverifikasi. Informasi yang andal pada laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki karakteristik : penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan untuk disajikan dapat diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyajikan laporan keuangan dapat dibandingkan yang artinya informasi dalam laporan keuangan akan berguna jikadapatdibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Sistem pelaporan keuangan pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dipahami artinya laporan keuangan dapat dipahami pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) setelah memeriksa laporan keuangan dengan mengeluarkan pernyataan berupa opini. Hasil penilaian badan pemeriksa keuangan (BPK) dinyatakan dalam 4 opini, yaitu Wajar tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memperoleh opini WTP sebanyak 6 kali dan 5 kali secara berturut-turut dan oleh Kementerian Keuangan diberikan penghargaan atas pencapaian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara kualitas, laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Sulawesi Tengah telah memenuhi unsur unsur kualitatif sebagai mana yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan kewajaran terhadap informasi laporan keuangan disajikan atas dasar criteria opini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kriteria opini tersebut, yaitu kesesuaian dengan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Kabid Akuntansi, penyajian laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah menerapkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Tentang penyajian Laporan Keuangan berbasis akrual.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah masih terus melakukan penguatan baik dalam kompetensi pegawainya, pemanfaatan sistem informasi keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Rendahnya tingkat penerapan Standar akuntansi pemerintah nantinya akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan berbenah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memahami berbasis akrual. Intensif melakukan sosialisasi dan pelatihan peraturan Standar Akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010. Sumber daya manusia yang telah diberikan sosialisasi dan pelatihan diharapkan dapat meneruskan ilmu tersebut kepada atasan atau rekan pada tiap-tiap SKPD yang di lingkungan provinsi Sulawesi Tengah, sehingga transformasi ilmu tersebut cepat dan proses penyusunan laporan keuangan berjalan lancar dan baik.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah didampingi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk persiapan pembenahan penerapan basis akrual dalam pengelolaan keuangan terutama aset. Pembenahan yang dilakukan dari tahun 2015 dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tentang kebijakan akuntansi dan system akuntansi.

Kompetensi sumber daya manusia yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, masih minimnya alokasi pegawai pada unit pengelola keuangan khususnya penyusun laporan keuangan dan masih kurangnya pemahaman dasar pegawai tentang administrasi keuangan daerah. Alokasi penempatan pegawai yang berlatar belakang akuntansi tidak merata dan belum sesuai dengan tugas dan fungsi pada tiap-tiap SKPD pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil informasi yang diperoleh, tahun-tahun sebelumnya pegawai yang berlatar belakang keuangan banyak diterima, namun alokasinya ditempat bidang-bidang non keuangan. Sumber daya manusia yang berlatar belakang non akuntansi, akan tetapi dianggap mampu melaksanakan penyusunan laporan dengan modal diklat dan bimbingan.

Saat ini khususnya di lingkungan pengelolaan keuangan menurut Kepala Bidang Akuntansi BPKAD bahwa untuk kompetensi pegawai dibidang akuntansi saat ini relatif memadai, hal ini ditunjang dari latar belakang pendidikan S1 dan S2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan berbenah lagi khususnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan alokasi pegawai khususnya bagian penyusun laporan keuangan, penambahan diklat sesuai kebutuhan penyusunan laporan keuangan untuk menambah pemahaman pegawai, serta kebijakan pimpinan SKPD untuk menempatkan dan mengikut sertakan pegawai sesuai dengan latar belakang.

Pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi secara optimal dari komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan internet dan jenis lainnya sudah cukup baik dioperasikan dan sudah terpenuhinya fasilitas pendukung teknologi informasi.

Menurut Kepala Bidang Akuntansi bahwa saat ini ketersediaan infrastruktur pendukung seperti computer, jaringan dan peralatan lainnya telah memadai. Sudah cukupnya fasilitas computer, jaringan

internet, serta pemeliharaan dan perbaikan computer untuk proses akuntansi sampai pembuatan laporan keuangan menggunakan SIMDA. Namun masih perlu diperbaiki dan benahi dalam hal koneksi yang terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah dan SIMDA BMD sehingga nanti menghasilkan system informasi keuangan yang berkualitas dan terintegrasi. SIMDA BMD belum maksimal dilakukan karena salah satu permasalahan opini BPK adalah belum terkelola dengan baik pengelolaan asset dan tidak sesuai dengan fisik dilapangan. Pegawai sudah memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengoperasikan computer dan internet untuk pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan dengan baik.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus mengoptimalkan perangkat teknologi informasi, pengelolaan asset yang terintegrasi dengan SIMDA keuangan, dan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Hal yang dilakukan melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan aplikasi SIMDA baik didaerah maupun tingkat nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan 1) Laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah PP. 71 Tahun 2010. 2) Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah didukung dengan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi system informasi keuangan pemerintah daerah.

SARAN

Rekomendasi saran 1) Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang kualitas laporan keuangan disarankan dapat menambahkan factor lainnya yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, misalnya system akuntansi pemerintah daerah, peran internal audit pemerintah, dan pengelolaan aset. 2) Diharapkan agar pemerintah Sulawesi Tengah untuk lebih menguatkan lagi kemampuan kompetensi aparturnya, pengembangan teknologi informasi guna pemanfaatan system informasi yang *update* terhadap regulasi terkait pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah selain itu juga pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, NunuyNur. 2011. *Akuntansi Pemerintah: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Kencana. Jakarta.
- Alam S. 2007. *Sistem Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 22. No. 2. Hal. 188-200.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE. Yogyakarta.
- Lexy J, Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja. Rosdakarya. Bandung.
- M. Burhan Bungin. 2009. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana. Jakarta.
- McDaniel. Linda, Roger D Mrtin and Laureen A. Maines. 2002. *Evaluating Financial Reporting Quality*. Accounting Review. December 1
- Wirmie Eka Putra. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. Vol. 10. No. 2. Hal. 282-293.
- Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 *tentang Sistem Pengendalian Intern*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*